

**KEDUDUKAN UPAH PEKERJA DAN HAK PEKERJA LAINNYA TERHADAP HAK
MENDAHULU NEGARA ATAS TAGIHAN PAJAK DALAM PEMBERESAN HARTA
PAILIT**

Erlangga Ficahya Putra

Abstrak

Kepailitan merupakan sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang kemudian seluruh harta kekayaan debitur dijadikan jaminan bersama bagi para krediturnya. Dalam hal debitur pailit adalah badan usaha/perusahaan, tidak bisa dipungkiri terdapat tagihan upah buruh dan tagihan pajak sekaligus. Masalah tersebut akan menjadi pertentangan mengenai hak mendahului diantara tagihan upah buruh dan tagihan pajak, terlebih lagi kedua undang-undang serta pengaturan khusus yang mengatur ketenagakerjaan maupun perpajakan memberikan hak istimewa untuk didahului pembayarannya terhadap kreditur lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai kepastian hukum kedudukan pekerja terhadap hak mendahului negara atas tagihan pajak dalam prose kepailitan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 merubah kedudukan pekerja terhadap tagihan pajak dan menempatkan kedudukan pekerja berada diatas tagihan pajak dan kreditur separatis, dan kedudukan hak pekerja lainnya didahulukan pembayarannya terhadap tagihan negara kecuali terhadap kreditur separatis.

Kata kunci: hak mendahului; kepailitan; pekerja; pajak

**POSITION OF WORKERS' WAGES AND OTHER WORKERS' RIGHTS TO THE
STATE PREVIOUS RIGHTS TO TAX BILLINGS IN BANKRUPT ASSETS
SETTLEMENT**

Erlangga Ficahya Putra

Abstract

Bankruptcy is a general confiscation of all assets of the bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge who then all of the debtor's assets are used as joint guarantees for his creditors. wages and tax bills at the same time. The problem will be a conflict regarding the right of advance between the bill for labor wages and the bill for taxes, moreover, the two laws and special arrangements governing employment and taxation give special rights for payments to other creditors. This study aims to contribute ideas about the legal certainty of the position of workers against the state's prior rights to tax bills in the bankruptcy process. This research uses normative juridical research with literature study. In this study it can be concluded that after the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 changes the position of workers against tax bills and places workers above tax bills and separatist creditors, and the position of other workers' rights takes precedence over state bills except for separatist creditors.

Keywords: pre-emptive rights; bankruptcy; workers; tax